

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sektor pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pada gilirannya sumber daya tersebut menjadi asset yang cukup penting dalam penyelenggaraan pembangunan bangsa ke depan terutama dalam upaya menyaingi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut berbagai pola pikir dan skill masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Keterampilan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pembangunan bangsa, hal tersebut memacu masyarakat menjadi lebih antusias dalam mengikuti pendidikan lewat berbagai program dan jalur pendidikan. Dalam kondisi seperti ini masyarakatpun semakin peka untuk menentukan pilihan terhadap institusi pendidikan sesuai dengan bakat dan keahlian yang mereka inginkan.

Berkaitan dengan tuntutan masyarakat, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan dalam kaitannya dengan pemerataan pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dengan menerapkan berbagai program lewat jalur-jalur pendidikan baik formal maupun non formal. Arah dan kebijakan pemerintah itupun melahirkan berbagai program yang cukup strategis dan secara langsung dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam sektor pendidikan ini pemerintah memprogramkan pendidikan dasar sembilan tahun yang mencakup pendidikan formal tingkat Sekolah Dasar selama 6 tahun dan Sekolah Mengah

Pertama 3 tahun. Program ini menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk mencerdaskan anak bangsa.

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7-12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di zaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

Kendatipun demikian, optimalisasi program pendidikan dasar sembilan tahun yang telah diprogramkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang di atas, sepenuhnya belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Terdapat banyak persoalan yang menjadi tantangan dan hambatan, mulai dari kesadaran masyarakat, ketersediaan sarana pendidikan sampai pada jangkauan letak geografis yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Fakta membuktikan bahwa di tengah-tengah giatnya pemerintah melakukan pembaharuan dan inovasi program pendidikan, masih saja ditemui sebagian masyarakat yang belum mengenyam pendidikan secara formal.

Salah satu permasalahan yang masih mengemuka adalah keterjangkauan secara geografis tempat tinggal penduduk dari lembaga pendidikan dasar 9 tahun

yang telah tersedia. Untuk permasalahan inipun pemerintah secara inovatif menciptakan strategis baru pendidikan pada desa-desa terpencil yang lebih diberdayakan melalui berbagai bantuan. Salah satu diantaranya adalah pengadaan sarana pendidikan, pembinaan keagamaan, latihan keterampilan dan sebagainya.

Program wajib belajar sembilan tahun sifatnya anjuran, tetapi program ini hendaknya memiliki kekuatan yang mampu mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Meskipun para orang tua yang tidak mengindahkan program ini tidak mendapatkan sanksi hukum, diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab moral untuk menyukseskan program ini. Tanggung jawab moral ini tidak semata-mata untuk pendidikan anaknya, tapi juga menyangkut tanggung jawab sebagai warga negara yang harus berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan tujuan wajib belajar 9 tahun memerlukan kerja sama yang kooperatif khususnya partisipasi masyarakat dalam memberikan motivasi keluarga untuk wajib menyekolahkan anaknya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program Wajib Belajar dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi Dewan Pendidikan, memberikan bantuan penyelenggaraan sarana pendidikan bagi sekolah.

Di sisi lain, bahwa di beberapa pelosok Indonesia masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan perhatian terutama mengenai pendidikan. Mereka adalah kelompok masyarakat yang sering disebut dengan masyarakat “terasing” yang memiliki sifat “*fatalisme*”, yaitu masyarakat yang rendah wawasan pikirannya untuk menggapai atau merencanakan masa depan mereka. Sikap semacam ini terlihat dari adanya pandangan bahwa keberhasilan

yang diraih bukan merupakan hasil kerja keras, tetapi karena kekuatan yang berada dari luar dirinya, yaitu kekuatan *supranatural*.

Kaitannya dengan pemikiran tersebut di atas, bahwa masyarakat suku Bajo di Desa Torosiaje adalah kelompok masyarakat yang masih melekat dengan sifat fatalismenya yang masih umumnya lebih mementingkan anaknya untuk bekerja, belum lagi suku Bajo yang tidak menerima budaya luar yang masuk dikalangan masyarakat. Sehingga Warga suku Bajo di Desa Torsiaje dewasa ini sangat jauh tertinggal dengan warga masyarakat lainnya, terutama dalam hal pendidikan. Kondisi tersebut dapat diidentifikasi dari kondisi anak usia sekolah di desa tersebut yang hampir sebagian besar tidak berpendidikan. Kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya seakan mulai hilang karena tidak menyadari pentingnya pendidikan dasar. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti permasalahan di Desa Torsiaje, terutama yang berhubungan dengan pendidikan dasar 9 tahun.

Permasalahan tersebut menjadi sangat menarik untuk ditelaah, mulai dari identifikasi kurang ketersediaan lembaga pendidikan formal, sampai pada kesadaran masyarakatnya akan kebutuhan pendidikan. Hal ini kemudian memberikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan formulasi judul “Partisipasi Masyarakat Suku Bajo dalam menuntaskan Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada:

1. Partisipasi masyarakat suku Bajo terhadap pembelajaran anak di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
2. Partisipasi masyarakat suku Bajo melalui dukungan fisik ke sekolah di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
3. Partisipasi masyarakat suku Bajo terhadap dan kualitas sekolah di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
4. Kendala-Kendala yang dihadapi Suku Bajo dalam mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat suku Bajo terhadap pembelajaran anak di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat suku Bajo melalui dukungan fisik ke sekolah di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat suku Bajo melalui rasa tanggungjawab terhadap kemajuan dan kualitas sekolah di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

4. Kendala-Kendala yang dihadapi Suku Bajo dalam mensukseskan Wajib Belajar 9 Tahun di SDN 1 Torsiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Sekolah, Penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dalam memetakan persoalan yang muncul tentang capaian sekolah SDN 1 Torsiaje dalam hal menjangkau pendidikan anak usia sekolah.
2. Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat menumbuhkembangkan perhatian terhadap pendidikan anak, dan agar dengan adanya partisipasi masyarakat khususnya masyarakat suku Bajo maka secara otomatis semua program pendidikan dapat berjalan lancar dan sukses.
3. Bagi peneliti, Memberikan cakrawala pola pikir dan pola tindak secara analisis, filosofis dalam mengaplikasikan ilmu pendidikan yang diperoleh melalui instansi perguruan tinggi.